



WALIKOTA MAGELANG

RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR TAHUN 2013

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 15);
38. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
40. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
41. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Magelang, Perusahaan Daerah Percetakan, dan Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 17);
45. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

1. Pendapatan:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. 91.333.408.000,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp. 470.522.180.000,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | <u>Rp. 80.862.026.000,-</u> |

Jumlah Pendapatan	Rp. 642.717.614.000,-
-------------------	-----------------------

2. Belanja:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp. 348.058.801.000,- |
| 2) Belanja Bunga | Rp. 0,- |
| 3) Belanja Subsidi | Rp. 0,- |
| 4) Belanja Hibah | Rp. 3.256.127.000,- |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | Rp. 2.693.873.000,- |

6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	500.000.000,-
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>7.751.549.000,-</u>
		<u>Rp. 362.260.350.000,-</u>
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	31.143.411.000,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	169.419.420.000,-
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>86.413.433.000,-</u>
		<u>Rp. 286.976.264.000,-</u>
	Jumlah Belanja	Rp. 649.236.614.000,-
	Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (6.519.000.000,-)</u>
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan	Rp.	13.220.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>6.701.000.000,-</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 6.519.000.000,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 hingga Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal November 2013

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG

SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	642.717.614.000,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	91.333.408.000,00	
4 . 1 . 1	Pajak Daerah	13.233.700.000,00	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	642.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 02	Hotel Bintang Lima	231.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 01 . 03	Hotel Bintang Empat	60.300.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	81.500.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 01 . 05	Hotel Bintang Dua	178.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	62.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Dua	6.500.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 01 . 09	Hotel Melati Satu	21.500.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	1.200.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	765.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	512.440.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	117.260.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 02 . 03	Café	42.240.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 02 . 04	Kantin	1.980.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 02 . 05	Katering	8.880.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 02 . 06	Pedagang Kaki Lima	79.200.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 02 . 08	Jasa Boga	3.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	850.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	13.200.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 03 . 05	Pameran	753.866.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	30.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Biliar	1.716.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 03 . 15	Permainan Ketangkasan	43.274.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 03 . 19	Pertandingan Olahraga	4.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 03 . 21	Rental/PS	1.650.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 03 . 23	Insidental	2.294.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	650.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	448.700.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	198.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 04 . 04	Reklame Selebaran	1.980.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 04 . 05	Reklame Berjalan	1.320.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	4.500.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	4.494.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 05 . 02	Genset	6.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	30.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	30.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Bawah Tanah	85.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Bawah tanah	85.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 09	Pajak Sarang Burung Walet	11.700.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 16 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16.
4 . 1 . 1 . 09 . 01	Pajak Sarang Burung Walet	11.700.000,00	
4 . 1 . 1 . 14	Pajak Bumi dan Bangunan	3.700.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Diundangkan di Magelang pada tanggal 28 Juni 2012, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 6.
4 . 1 . 1 . 14 . 02	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	3.700.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 15	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 9 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Diundangkan di Magelang pada tanggal 31 Desember 2010, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9.
4 . 1 . 1 . 15 . 01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.000.000.000,00	
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	7.308.930.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	5.084.944.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.051.617.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 2 . 01 . 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	297.592.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
4 . 1 . 2 . 01 . 03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	144.880.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
4 . 1 . 2 . 01 . 04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	19.800.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	493.740.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
4 . 1 . 2 . 01 . 06	Retribusi Pelayanan Pasar	565.887.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
4 . 1 . 2 . 01 . 07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	404.975.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
4 . 1 . 2 . 01 . 08	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	5.450.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
4 . 1 . 2 . 01 . 11	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	7.500.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
4 . 1 . 2 . 01 . 13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	93.503.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 17 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17.
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	1.376.036.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	547.858.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 2 . 02 . 04	Retribusi Terminal	610.002.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
4 . 1 . 2 . 02 . 05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	56.976.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
4 . 1 . 2 . 02 . 08	Retribusi Rumah Potong Hewan	86.200.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
4 . 1 . 2 . 02 . 10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 18 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18.
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	847.950.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	750.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	90.000.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.
4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Trayek	7.950.000,00	Perda Kota Magelang Nomor 19 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tanggal 30 Desember 2011. Diundangkan di Magelang pada tanggal 30 Desember 2011, Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19.
4 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.258.603.000,00	
4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	2.345.704.000,00	
4 . 1 . 3 . 01 . 01	Perusahaan Daerah	2.345.704.000,00	
4 . 1 . 3 . 04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	2.821.939.000,00	
4 . 1 . 3 . 04 . 01	Bank Pembangunan Daerah	1.348.055.000,00	
4 . 1 . 3 . 04 . 02	Perusahaan Daerah Bank Pasar	1.335.590.000,00	
4 . 1 . 3 . 04 . 03	Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan	138.294.000,00	
4 . 1 . 3 . 06	Bagian Laba Penyertaan Modal/Investasi Kepada Pihak Ketiga	90.960.000,00	
4 . 1 . 3 . 06 . 01	Koperasi	87.360.000,00	
4 . 1 . 3 . 06 . 02	Pengusaha Kecil Menengah	3.600.000,00	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	65.532.175.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	19.175.000,00	Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD RSU Tidar Kota Magelang, diundangkan tanggal 28 Desember 2012 Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 63.
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	19.175.000,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.500.000.000,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.500.000.000,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	3.000.000.000,00	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	3.000.000.000,00	
4.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	13.000.000,00	
4.1.4.14.01	Penjualan Tanaman	3.000.000,00	
4.1.4.14.02	Penjualan Benih Ikan	5.000.000,00	
4.1.4.14.03	Penerimaan dari Perpustakaan	5.000.000,00	
4.1.4.15	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	61.000.000.000,00	
4.1.4.15.01	Pelayanan kesehatan RSUD	61.000.000.000,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	470.522.180.000,00	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.100.861.000,00	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	18.307.744.000,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	2.988.467.000,00	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	11.393.162.000,00	
4.2.1.01.05	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	3.926.115.000,00	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	793.117.000,00	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	354.585.000,00	
4.2.1.02.06	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	300.072.000,00	
4.2.1.02.08	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	66.752.000,00	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	20.816.000,00	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	50.892.000,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	417.211.449.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	417.211.449.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	417.211.449.000,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	34.209.870.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus	34.209.870.000,00	
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Kesehatan	5.027.360.000,00	
4.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pendidikan	11.636.920.000,00	
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pekerjaan Umum	7.084.710.000,00	
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pertanian	2.384.930.000,00	
4.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Lingkungan Hidup	1.013.050.000,00	
4.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Kelautan dan Perikanan	2.346.240.000,00	
4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana	687.570.000,00	
4.2.3.01.10	Dana Alokasi Khusus Bidang Perdagangan	3.291.620.000,00	
4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus Bidang Perhubungan	737.470.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	80.862.026.000,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	18.183.916.000,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	18.183.916.000,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	6.633.884.000,00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.624.089.000,00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.921.403.000,00	
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	4.540.000,00	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	62.678.110.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	62.678.110.000,00	
4.3.4.01.01	Dana Penyesuaian /kontijensi/Penyeimbang dari Pemerintah	62.678.110.000,00	
5	BELANJA DAERAH	649.236.614.000,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	362.260.350.000,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	348.058.801.000,00	
5.1.1.01	Gaji Dan Tunjangan	249.619.791.000,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	187.861.114.212,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	17.613.249.244,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	6.042.564.150,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	12.152.035.414,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.418.615.631,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	11.046.512.962,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.578.984.255,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.636.479,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	4.440.770.653,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia / Badan Musyawarah	17.722.000,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	38.916.000,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia / Badan Anggaran	16.626.000,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	16.626.000,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	127.160.000,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.437.600.000,00	
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	300.000.000,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	240.300.000,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	
5.1.1.01.20	Tunjangan Badan Legislasi Daerah	16.626.000,00	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	95.628.810.000,00	
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	123.600.000,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	32.781.500.000,00	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pengamanan Persandian	45.600.000,00	
5.1.1.02.08	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Non Sertifikasi Pendidik	1.943.750.000,00	
5.1.1.02.09	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Sertifikasi Pendidik	60.734.360.000,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	1.660.000.000,00	
5.1.1.03.01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00	
5.1.1.03.02	Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	722.809.000,00	
5.1.1.05.01	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	722.809.000,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	427.391.000,00	
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	427.391.000,00	
5.1.4	Belanja Hibah	3.256.127.000,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	2.573.592.000,00	
5.1.4.05.01	Badan/ lembaga/ organisasi swasta	1.154.500.000,00	
5.1.4.05.02	Sekolah	1.419.092.000,00	
5.1.4.06	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	682.535.000,00	
5.1.4.06.01	Kelompok / anggota masyarakat	682.535.000,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.693.873.000,00	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.148.240.000,00	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	1.148.240.000,00	
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	847.950.000,00	
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	847.950.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.5.04	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan	697.683.000,00	
5.1.5.04.01	Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan	697.683.000,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	500.000.000,00	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	500.000.000,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	500.000.000,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	7.751.549.000,00	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	7.751.549.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	7.751.549.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	286.976.264.000,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	31.143.411.000,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	22.137.860.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.492.955.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	193.325.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.081.900.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.351.685.000,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Pelayanan Kesehatan	1.017.995.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.775.100.000,00	
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.093.745.000,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.973.850.000,00	
5.2.1.02.03	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	142.200.000,00	
5.2.1.02.04	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	565.305.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	1.787.156.000,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.647.225.000,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	139.931.000,00	
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	3.443.295.000,00	
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit	3.443.295.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	169.419.420.000,00	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.115.024.500,00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.163.253.500,00	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	531.395.000,00	
5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	194.457.000,00	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	377.315.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	765.913.000,00	
5.2.2.01.07	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	1.310.000,00	
5.2.2.01.08	Belanja pengisian tabung gas	64.106.000,00	
5.2.2.01.11	Belanja peralatan rumah tangga	17.275.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.844.389.000,00	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	2.871.577.000,00	
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	1.387.736.000,00	
5.2.2.02.03	Belanja bibit ternak	121.425.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.328.923.000,00	
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	807.735.000,00	
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Percontohan	494.448.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan	1.815.445.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja bahan pakan ternak	17.100.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.057.423.000,00	
5.2.2.03.01	Belanja telepon	505.914.000,00	
5.2.2.03.02	Belanja air	871.173.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.995.769.000,00	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	10.000.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	179.068.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	597.870.000,00	
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	87.046.000,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	150.646.000,00	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	17.000.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Tenaga Kerja non Pegawai	1.262.493.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam	2.663.017.000,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pembuat Minum	80.964.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Petugas Lapangan	826.903.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan/Retribusi Sampah	2.886.422.000,00	
5.2.2.03.17	Belanja Tali Asih Purna Tugas	15.000.000,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Kotak Pos	540.000,00	
5.2.2.03.19	Belanja Papan Nama/Papan Data/dan Papan Pengumuman	133.803.000,00	
5.2.2.03.20	Belanja Vandel/Plangkat/Pigura/Tropy/Bendera/Cinderamata	1.078.306.000,00	
5.2.2.03.21	Belanja Pensertifikatan Tanah	44.000.000,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Layanan Internet	264.556.000,00	
5.2.2.03.23	Belanja Jasa Layanan TV Kabel	24.500.000,00	
5.2.2.03.24	Belanja Jasa untuk pemeliharaan bangunan gedung dan monumen	1.132.486.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.105.197.000,00	
5.2.2.03.26	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat studio dan Alat Komunikasi	90.721.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja Jasa untuk pemeliharaan jaringan	551.175.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja Jasa untuk pemeliharaan buku perpustakaan	81.550.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 29	Belanja Jasa untuk pemeliharaan instalasi	40.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 30	Belanja Jasa Untuk Pemeliharaan Alat-Alat Berat	91.850.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 31	Belanja Jasa untuk pemeliharaan Alat-alat kesehatan	316.928.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa untuk pemeliharaan barang bercorak seni	46.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Konsultasi	1.087.793.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 34	Belanja Transportasi dan Akomadasi	887.543.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Dokumentasi	284.724.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 36	Belanja Dekorasi	800.240.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 38	Belanja Pembuatan plat	2.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 39	Belanja Jasa Pemasangan iklan dan Radio Spot	418.650.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 40	Belanja Jasa Administrasi Pembayaran PBB	78.100.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 41	Belanja Pemeliharaan Alat Uji	80.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 42	Belanja penyediaan dana pengembangan sekolah	12.655.846.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 43	Belanja Penyediaan Dana Beasiswa	1.161.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 44	Belanja Pembinaan/Lomba	1.161.475.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 45	Belanja rujukan pelayanan kesehatan	7.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 46	Belanja pengganti uang transport/uang saku	2.577.855.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 47	Belanja Pemeliharaan Kesehatan	48.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 48	Belanja Pembinaan RT/RW	1.307.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 49	Belanja Kontribusi APEKSI/FORSESDASI	68.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 50	Belanja pembinaan pembantu pencatat nikah	26.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 51	Belanja pembinaan ustadz/ustadzah	212.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 52	Belanja Pendaftaran Perkara	8.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 53	Belanja Kontribusi Angkutan Mudik Lebaran	30.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	10.475.098.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	350.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 07	Belanja Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat	10.125.098.000,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.002.191.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	584.608.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.334.302.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.444.888.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	9.805.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	406.964.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	1.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Jasa Perbaikan Ringan dan Berat	220.624.000,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	5.847.695.000,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.663.746.000,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.782.407.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	401.278.000,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 04	Belanja Laminating	264.000,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	645.784.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	527.234.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	118.550.000,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	484.900.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	482.900.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	2.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	1.460.842.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	260.078.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja sewa komputer dan printer	100.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja sewa generator	13.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja sewa tenda/ karpet/ tikar	472.912.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	134.743.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja sewa Sound System	304.215.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa alat praktek	113.090.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja sewa peralatan makan & minum	62.804.000,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman	9.388.424.500,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	752.986.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.150.788.500,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.204.752.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pasien	63.890.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja makanan dan minuman petugas piket	216.008.000,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya	431.142.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	80.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	51.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	50.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	55.780.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	26.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	64.425.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 07	Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas	78.137.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 08	Belanja Pakaian Sipil Resmi	25.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	179.459.000,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	165.379.000,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja pakaian kerja PMK	14.080.000,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	492.752.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 01	Belanja pakaian KORPRI	2.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	24.250.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	63.990.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	402.512.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.356.531.000,00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.893.263.000,00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.463.268.000,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	65.400.000,00	
5.2.2.16.01	Belanja beasiswa tugas belajar D3	2.000.000,00	
5.2.2.16.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	40.000.000,00	
5.2.2.16.06	Belanja Bantuan Penyingkiran Calon Siswa STPDN, IIP, Program Magister)	3.000.000,00	
5.2.2.16.10	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1	20.400.000,00	
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	2.283.960.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	2.173.960.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	50.000.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja bimbingan teknis	60.000.000,00	
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	45.575.000,00	
5.2.2.18.02	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah	45.575.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.547.691.000,00	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	324.466.000,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan	792.596.000,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Halaman/Taman/Tanaman	1.075.022.000,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air	355.607.000,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	309.350.000,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	48.000.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	261.350.000,00	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	317.140.000,00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	317.140.000,00	
5.2.2.25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.532.965.000,00	
5.2.2.25.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	47.532.965.000,00	
5.2.2.26	Belanja Hibah Barang dan / Jasa	1.247.384.000,00	
5.2.2.26.01	Belanja Hibah Barang dan / Jasa Kepada Masyarakat	1.247.384.000,00	
5.2.2.27	Belanja Bantuan Sosial Barang	208.300.000,00	
5.2.2.27.01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat	208.300.000,00	
5.2.2.28	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	1.080.000.000,00	
5.2.2.28.01	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	1.080.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3	Belanja Modal	86.413.433.000,00	
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	3.823.118.000,00	
5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	844.300.000,00	
5.2.3.03.04	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor bus	2.184.005.000,00	
5.2.3.03.09	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up	234.500.000,00	
5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	560.313.000,00	
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	223.742.000,00	
5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	218.742.000,00	
5.2.3.04.06	Belanja modal pengadaan kereta dorong/troli	5.000.000,00	
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	28.349.000,00	
5.2.3.08.05	Belanja modal Pengadaan mesin Pompa	10.000.000,00	
5.2.3.08.06	Belanja Modal Pengadaan Katrol	18.349.000,00	
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	149.173.000,00	
5.2.3.09.05	Belanja modal Pengadaan mesin rumput	5.225.000,00	
5.2.3.09.07	Belanja modal pengadaan alat pengolah/pemilah sampah	94.753.000,00	
5.2.3.09.09	Belanja modal pengadaan alat pengolah tanaman	49.195.000,00	
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	141.170.000,00	
5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	13.083.000,00	
5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	3.121.000,00	
5.2.3.10.08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	7.616.000,00	
5.2.3.10.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor PMK	114.850.000,00	
5.2.3.10.16	Belanja Modal Pengadaan alat-alat olahraga	2.500.000,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	610.593.000,00	
5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	271.747.000,00	
5.2.3.11.03	Belanja modal Pengadaan brankas	9.470.000,00	
5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	62.101.000,00	
5.2.3.11.05	Belanja modal Pengadaan white board	200.000,00	
5.2.3.11.07	Belanja modal Pengadaan sound system	1.210.000,00	
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan AC	78.467.000,00	
5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	5.612.000,00	
5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan Genset	4.200.000,00	
5.2.3.11.13	Belanja Modal Pengadaan Podium	1.525.000,00	
5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Pompa	6.610.000,00	
5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan	5.506.000,00	
5.2.3.11.16	Belanja Modal Pengadaan Tangga	1.100.000,00	
5.2.3.11.18	Belanja Modal Pengadaan Papan Informasi/Data>Nama	162.845.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.091.810.000,00	
5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	131.998.000,00	
5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	277.666.000,00	
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	354.468.000,00	
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	212.280.000,00	
5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	30.788.000,00	
5.2.3.12.06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	22.355.000,00	
5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	25.942.000,00	
5.2.3.12.09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker)	860.000,00	
5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	564.636.000,00	
5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan LCD komputer	98.400.000,00	
5.2.3.12.12	Belanja modal pengadaan software	108.607.000,00	
5.2.3.12.13	Belanja Modal Pengadaan Pembaca Kartu Elektronik	263.810.000,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.032.696.000,00	
5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	166.680.000,00	
5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	260.614.000,00	
5.2.3.13.03	Belanja modal Pengadaan meja makan	11.440.000,00	
5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	86.509.000,00	
5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	61.281.000,00	
5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	97.722.000,00	
5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	139.930.000,00	
5.2.3.13.10	Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Komputer	12.885.000,00	
5.2.3.13.12	Belanja modal Pengadaan Meja Kursi Lipat	95.913.000,00	
5.2.3.13.14	Belanja modal Pengadaan Meja dan Kursi Panjang Tunggu	28.853.000,00	
5.2.3.13.15	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Tamu	38.849.000,00	
5.2.3.13.18	Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar	26.400.000,00	
5.2.3.13.22	Belanja Modal Meja dan Kursi Siswa	5.620.000,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	35.574.000,00	
5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	4.216.000,00	
5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	5.169.000,00	
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	13.582.000,00	
5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	2.000.000,00	
5.2.3.14.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	4.307.000,00	
5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Dapur Lainnya	6.300.000,00	
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	151.713.000,00	
5.2.3.15.02	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	2.500.000,00	
5.2.3.15.03	Belanja modal Pengadaan gorden	68.437.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.15.04	Belanja modal Pengadaan Televisi	44.852.000,00	
5.2.3.15.05	Belanja modal Pengadaan karpet	27.331.000,00	
5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Kipas angin	4.843.000,00	
5.2.3.15.10	Belanja modal Pengadaan Parabola	3.000.000,00	
5.2.3.15.11	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan	750.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	263.745.000,00	
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	106.056.000,00	
5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	27.277.000,00	
5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	110.644.000,00	
5.2.3.16.05	Belanja modal Pengadaan Microphone	2.000.000,00	
5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Aksesoris	17.768.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	51.023.000,00	
5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	9.093.000,00	
5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faximili	4.000.000,00	
5.2.3.17.04	Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)	18.400.000,00	
5.2.3.17.09	Belanja modal Pengadaan wireless/megaphone	19.530.000,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	29.067.000,00	
5.2.3.18.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS	26.067.000,00	
5.2.3.18.11	Belanja Modal Pengadaan Meteran Laser	3.000.000,00	
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	2.001.435.000,00	
5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	1.733.978.000,00	
5.2.3.19.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan	53.502.000,00	
5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan alat-alat penunjang pelayanan kesehatan	213.955.000,00	
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	366.458.000,00	
5.2.3.20.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	151.341.000,00	
5.2.3.20.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	14.659.000,00	
5.2.3.20.04	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian	200.458.000,00	
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	19.612.070.000,00	
5.2.3.21.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	19.612.070.000,00	
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	274.945.000,00	
5.2.3.22.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang	94.945.000,00	
5.2.3.22.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	180.000.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	3.678.699.000,00	
5.2.3.23.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	636.523.000,00	
5.2.3.23.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	157.250.000,00	
5.2.3.23.07	Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir	73.811.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.23.09	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air limbah/kotor	2.811.115.000,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	628.505.000,00	
5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	628.505.000,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	33.950.270.000,00	
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	10.920.124.000,00	
5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	569.370.000,00	
5.2.3.26.05	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah	10.134.000,00	
5.2.3.26.06	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	2.900.000.000,00	
5.2.3.26.08	Belanja modal Pengadaan konstruksi garasi	152.067.000,00	
5.2.3.26.11	Belanja modal Pengadaan konstruksi pagar	1.791.931.000,00	
5.2.3.26.16	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian IPAL Limbah	959.680.000,00	
5.2.3.26.17	Belanja modal pengadaan konstruksi sarana Kesehatan Lingkungan	1.352.911.000,00	
5.2.3.26.18	Belanja modal pengadaan konstruksi halaman kantor	374.695.000,00	
5.2.3.26.19	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian tempat pembuangan sampah	33.390.000,00	
5.2.3.26.20	Belanja modal pengadaan papan nama/data	50.000.000,00	
5.2.3.26.21	Belanja Modal pengadaan konstruksi sarpras olah raga	9.065.750.000,00	
5.2.3.26.22	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian Gedung Pasar	3.843.416.000,00	
5.2.3.26.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Penahan Tanah	772.791.000,00	
5.2.3.26.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	1.154.011.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	973.393.000,00	
5.2.3.27.01	Belanja modal Pengadaan buku matematika	811.500.000,00	
5.2.3.27.05	Belanja modal Pengadaan buku biografi	540.000,00	
5.2.3.27.09	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	35.200.000,00	
5.2.3.27.10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	8.080.000,00	
5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan buku sejarah	3.000.000,00	
5.2.3.27.12	Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya	9.000.000,00	
5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	37.510.000,00	
5.2.3.27.14	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	3.000.000,00	
5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	9.873.000,00	
5.2.3.27.17	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	2.400.000,00	
5.2.3.27.18	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	210.000,00	
5.2.3.27.19	Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan	200.000,00	
5.2.3.27.20	Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan	300.000,00	
5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	40.810.000,00	
5.2.3.27.22	Belanja modal Pengadaan buku naskah	2.000.000,00	
5.2.3.27.26	Belanja modal Pengadaan buku kesehatan	200.000,00	
5.2.3.27.27	Belanja modal Pengadaan buku karya umum	3.200.000,00	
5.2.3.27.28	Belanja modal pengadaan buku filsafat dan psikologi	3.200.000,00	
5.2.3.27.29	Belanja modal pengadaan buku ilmu-ilmu murni (pasti/alam)	3.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.27.30	Belanja modal pengadaan buku olahraga	170.000,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	4.096.799.000,00	
5.2.3.28.07	Belanja modal Taman	4.086.799.000,00	
5.2.3.28.10	Belanja Modal Sarana Prasarana Taman	10.000.000,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	18.325.000,00	
5.2.3.29.03	Belanja modal Pengadaan tanaman	18.325.000,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	8.500.000,00	
5.2.3.30.13	Belanja modal Pengadaan Kamera Pengawas/CCTV	8.500.000,00	
5.2.3.31	Belanja modal Instalasi/Jaringan	1.813.136.000,00	
5.2.3.31.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Lalu lintas	1.793.136.000,00	
5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi/Jaringan Air Bersih / Air Minum	20.000.000,00	
5.2.3.33	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kewirausahaan	335.385.000,00	
5.2.3.33.02	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tata Busana	109.660.000,00	
5.2.3.33.03	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tata Boga	34.375.000,00	
5.2.3.33.05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Service Kendaraan	191.350.000,00	
5.2.3.36	Belanja Modal BLUD	10.023.740.000,00	
5.2.3.36.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit	10.023.740.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.519.000.000,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.220.000.000,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13.000.000.000,00	
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	13.000.000.000,00	
6.1.1.04.12	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	13.000.000.000,00	
6.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	220.000.000,00	
6.1.7.01	Penerimaan Dana Bergulir	220.000.000,00	
6.1.7.01.01	Penerimaan Dana Bergulir IKM dan UKM	220.000.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.701.000.000,00	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	
6.2.1.01	Pembentukan Dana Cadangan	2.000.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6 . 2 . 1 . 01 . 01	Pembentukan Dana Cadangan Nomor	2.000.000.000,00	
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.701.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.701.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 03	Bank Pembangunan Daerah	901.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 04	Percetakan Daerah Kota Magelang	100.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 05	Bank Magelang	1.500.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 06	Perusda Perbengkelan	200.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 07	Taman Kyai Langgeng	1.000.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 08	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	6.519.000.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

MAGELANG, 18 Nopember 2013

WALIKOTA

ttd.

Ir. SIGIT WIDYONINDITO, M.T.